

PERPUSTAKAAN DALAM BAYANG-BAYANG PRIORITAS ANGGARAN: TANTANGAN PENYALURAN ANGGARAN BAGI PENGEMBANGAN LITERASI DI INDONESIA

Abstrak

Perpustakaan merupakan salah satu institusi penting dalam menyediakan akses terhadap informasi, pengetahuan, pendidikan, dan pengembangan literasi masyarakat. Meskipun memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, perpustakaan masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh dukungan anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran, persaingan dengan sektor pembangunan lainnya, perubahan kebijakan pemerintah, serta belum optimalnya pemahaman terhadap dampak jangka panjang perpustakaan menjadi faktor yang memengaruhi posisi perpustakaan dalam penentuan prioritas anggaran. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan perpustakaan yang belum selalu menjadi prioritas utama dalam penyaluran anggaran serta dampaknya terhadap kualitas layanan, pengembangan koleksi, transformasi digital, kompetensi tenaga perpustakaan, dan pemerataan akses informasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan memanfaatkan peraturan, dokumen pemerintah, publikasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta sumber ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik perpustakaan, tetapi juga pada keberlanjutan berbagai program literasi dan peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam melihat perpustakaan, dari sekadar tempat penyimpanan koleksi menjadi infrastruktur pengetahuan yang mendukung pembangunan manusia. Penguatan argumentasi berbasis data, peningkatan akuntabilitas anggaran, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan program yang memiliki dampak terukur menjadi langkah penting untuk meningkatkan posisi perpustakaan dalam kebijakan anggaran.

Kata kunci: perpustakaan, anggaran, literasi, kebijakan publik, pembangunan sumber daya manusia, layanan informasi

1. Pendahuluan

Perpustakaan merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan, penelitian, kebudayaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberadaan perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan buku, tetapi juga dengan penyediaan berbagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk belajar, memperoleh pengetahuan, melakukan penelitian, dan meningkatkan keterampilan.

Dalam perkembangan masyarakat informasi, fungsi perpustakaan semakin luas. Perpustakaan dituntut untuk menyediakan akses terhadap sumber informasi digital, membangun layanan

berbasis teknologi, meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan, menyediakan koleksi yang relevan, serta menciptakan berbagai kegiatan literasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, perkembangan tersebut membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, terutama dukungan anggaran. Tanpa anggaran yang cukup, perpustakaan akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan koleksi, memperbarui teknologi, meningkatkan fasilitas, menyelenggarakan kegiatan literasi, serta meningkatkan kompetensi pustakawan.

Permasalahan muncul ketika perpustakaan harus bersaing dengan berbagai sektor lain dalam memperoleh alokasi anggaran. Pemerintah memiliki banyak kebutuhan pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan formal, infrastruktur, perlindungan sosial, transportasi, dan sektor ekonomi. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus menentukan program yang dianggap memiliki dampak paling besar dan mendesak.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan perpustakaan berada pada posisi yang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan sektor pembangunan lainnya. Istilah “perpustakaan bukan prioritas” dalam artikel ini tidak berarti bahwa pemerintah sama sekali tidak memberikan anggaran kepada perpustakaan. Sebaliknya, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika kebutuhan perpustakaan belum memperoleh dukungan anggaran yang sebanding dengan peran strategisnya dalam pembangunan literasi dan sumber daya manusia.

Situasi tersebut masih relevan untuk dibahas. Pada 2026, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) menyampaikan bahwa kondisi fiskal membuat lembaga tersebut harus memilih program kerja yang dianggap berdampak karena tidak seluruh program dapat dijalankan dengan anggaran yang tersedia.

Bahkan, dalam pembahasan anggaran 2027, Komisi X DPR RI menilai pagu indikatif Perpusnas sebelumnya belum memadai untuk mendukung target peningkatan literasi nasional dan kemudian mendukung adanya tambahan anggaran.

Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan anggaran perpustakaan bukan sekadar persoalan jumlah dana, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana perpustakaan ditempatkan dalam prioritas pembangunan nasional dan daerah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

1. Mengapa perpustakaan masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh dukungan anggaran?
2. Apa dampak keterbatasan anggaran terhadap pengembangan dan pelayanan perpustakaan?

3. Bagaimana posisi perpustakaan dalam kebijakan pembangunan literasi dan sumber daya manusia?
4. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan prioritas anggaran perpustakaan?

3. Tujuan Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan permasalahan anggaran yang dihadapi perpustakaan.
2. Menganalisis faktor yang menyebabkan perpustakaan belum selalu menjadi prioritas dalam penyaluran anggaran.
3. Mengidentifikasi dampak keterbatasan anggaran terhadap kualitas layanan perpustakaan.
4. Menganalisis strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi perpustakaan dalam kebijakan anggaran.
5. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perpustakaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **studi pustaka (literature review)**. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang berkaitan dengan perpustakaan, kebijakan anggaran, literasi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta kebijakan pemerintah di bidang perpustakaan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dokumen pemerintah, publikasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan keuangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengidentifikasi permasalahan utama, menghubungkan keterbatasan anggaran dengan kondisi layanan perpustakaan, kemudian merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dukungan anggaran terhadap perpustakaan.

5. Pembahasan

5.1 Perpustakaan sebagai Infrastruktur Pengetahuan

Perpustakaan sering kali masih dipahami secara sederhana sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam buku. Pandangan tersebut menyebabkan keberadaan perpustakaan terkadang dianggap sebagai kebutuhan sekunder dibandingkan sektor pembangunan yang menghasilkan manfaat fisik secara langsung.

Padahal, perpustakaan memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Perpustakaan menyediakan akses terhadap informasi, mendukung pendidikan sepanjang hayat, membantu masyarakat meningkatkan keterampilan, menyediakan sumber penelitian, serta menjadi ruang pembelajaran masyarakat.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, perpustakaan dapat berperan sebagai infrastruktur pengetahuan. Infrastruktur pengetahuan tidak selalu menghasilkan pembangunan fisik yang dapat langsung terlihat, tetapi memberikan dampak terhadap kemampuan masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan informasi.

Oleh sebab itu, pengembangan perpustakaan seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah gedung atau jumlah koleksi yang dimiliki. Kualitas layanan, akses digital, kegiatan literasi, kompetensi pustakawan, serta manfaat yang diterima masyarakat juga harus menjadi indikator penting.

5.2 Mengapa Perpustakaan Sering Tidak Menjadi Prioritas Anggaran?

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan perpustakaan belum selalu mendapatkan prioritas dalam penyaluran anggaran.

a. Persaingan dengan sektor pembangunan lainnya

Anggaran pemerintah memiliki keterbatasan. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, ekonomi, dan sektor lainnya juga membutuhkan pendanaan yang besar.

Dalam situasi tersebut, pemerintah harus menentukan program berdasarkan urgensi, target pembangunan, serta kemampuan fiskal yang tersedia.

Akibatnya, program perpustakaan dapat bersaing dengan program lain yang dianggap lebih mendesak atau memiliki dampak yang lebih mudah dilihat dalam jangka pendek.

b. Dampak perpustakaan sulit terlihat secara langsung

Pembangunan jalan, gedung, jembatan, atau fasilitas kesehatan dapat terlihat secara fisik. Sementara itu, hasil dari layanan perpustakaan seperti meningkatnya kemampuan membaca, bertambahnya pengetahuan, meningkatnya keterampilan masyarakat, atau berkembangnya budaya belajar membutuhkan waktu untuk terlihat.

Karakteristik manfaat yang bersifat jangka panjang tersebut dapat menjadi salah satu tantangan dalam memperjuangkan anggaran perpustakaan.

c. Lemahnya penyajian data dampak program

Pengajuan anggaran akan lebih kuat apabila disertai data yang menunjukkan kebutuhan dan manfaat program.

Perpustakaan tidak cukup hanya menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan buku atau fasilitas. Perpustakaan perlu menunjukkan data mengenai jumlah pengguna, tingkat kunjungan, kebutuhan masyarakat, penggunaan koleksi, kegiatan literasi, tingkat kepuasan pengguna, serta dampak program terhadap masyarakat.

Dengan demikian, anggaran perpustakaan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil, bukan hanya berdasarkan kegiatan.

d. Ketergantungan pada kebijakan pemerintah daerah

Perpustakaan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Kemampuan fiskal setiap daerah berbeda sehingga kemampuan dalam mengembangkan perpustakaan juga tidak sama.

Perpusnas menyebut bahwa DAK Nonfisik bidang perpustakaan bersifat **stimulan**, bukan pengganti anggaran yang berasal dari APBD. Pada 2025, DAK Nonfisik tersebut mencapai Rp150 miliar untuk 207 lokasi prioritas, sedangkan pada 2026 alokasinya menjadi Rp125 miliar dengan penerima meningkat menjadi 272 daerah prioritas.

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah pusat dapat membantu, tetapi pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan layanan perpustakaan.

5.3 Dampak Keterbatasan Anggaran terhadap Perpustakaan

Keterbatasan anggaran dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek perpustakaan.

1. Terbatasnya pengembangan koleksi

Koleksi merupakan salah satu komponen utama perpustakaan. Perubahan kebutuhan informasi masyarakat menyebabkan perpustakaan harus terus memperbarui koleksinya.

Apabila anggaran pengadaan terbatas, perpustakaan akan kesulitan menyediakan bahan pustaka terbaru dan sesuai kebutuhan pengguna.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan koleksi menjadi kurang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

2. Terhambatnya transformasi digital

Perpustakaan saat ini tidak dapat hanya mengandalkan koleksi tercetak. Pengguna membutuhkan akses terhadap jurnal elektronik, buku elektronik, basis data, katalog daring, serta berbagai sumber informasi digital.

Transformasi digital membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan internet, keamanan sistem, serta tenaga yang memiliki kompetensi teknologi informasi.

Keterbatasan anggaran dapat memperlambat proses tersebut.

3. Terbatasnya fasilitas perpustakaan

Fasilitas yang nyaman merupakan bagian penting dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik.

Perpustakaan membutuhkan ruang baca, ruang diskusi, akses internet, komputer, fasilitas bagi penyandang disabilitas, ruang kegiatan, serta sarana pendukung lainnya.

Jika anggaran tidak mencukupi, pengembangan fasilitas dapat tertunda.

4. Pengembangan kompetensi pustakawan menjadi terbatas

Pustakawan dituntut memiliki kompetensi yang semakin luas. Selain pengelolaan koleksi, pustakawan perlu memahami teknologi informasi, literasi digital, literasi informasi, komunikasi, pengelolaan data, serta pelayanan masyarakat.

Pelatihan dan pengembangan profesional membutuhkan anggaran. Karena itu, keterbatasan dana dapat berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.

5. Berkurangnya kegiatan literasi

Kegiatan seperti pelatihan literasi digital, diskusi buku, kelas membaca, pelatihan keterampilan, kegiatan komunitas, dan program literasi masyarakat membutuhkan dukungan biaya.

Jika kegiatan tersebut tidak memperoleh dukungan yang cukup, perpustakaan akan lebih sulit menjalankan fungsi sosial dan edukatifnya.

5.4 Kondisi Anggaran Perpustnas sebagai Gambaran Nasional

Kondisi anggaran Perpustnas dapat memberikan gambaran mengenai tantangan pendanaan di tingkat nasional.

Pada 2025, Perpustnas menyampaikan bahwa pagu awal anggaran sebesar sekitar Rp721,68 miliar mengalami efisiensi sebesar Rp279,86 miliar atau sekitar 38,78 persen, sehingga anggaran yang dapat digunakan menjadi sekitar Rp441,83 miliar. Perpustnas menyatakan bahwa layanan publik dan program prioritas tetap dijalankan meskipun mengalami efisiensi.

Pada 2026, Perpustakaan kembali menghadapi keterbatasan anggaran. Dalam pembahasan dengan Komisi X DPR RI, Perpustakaan menyampaikan pagu sebesar sekitar Rp377,999 miliar, dengan sekitar Rp298,547 miliar untuk fungsi dukungan manajemen dan sekitar Rp79,452 miliar untuk fungsi perpustakaan dan literasi. Kondisi tersebut mendorong Perpustakaan mengusulkan tambahan anggaran.

Pada September 2026, Komisi X DPR RI menerima pagu Perpustakaan 2027 sebesar Rp417,725 miliar dan usulan tambahan Rp307,774 miliar, sehingga total pagu dan usulan tambahan yang disetujui mencapai sekitar Rp725,470 miliar. Tambahan tersebut diarahkan antara lain untuk bantuan bacaan bermutu, Relawan Literasi Masyarakat, KKN Tematik Literasi, jurnal elektronik, dan akreditasi perpustakaan sekolah/madrasah.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan anggaran perpustakaan tidak berarti pemerintah tidak memberikan perhatian sama sekali. Sebaliknya, terdapat berbagai program prioritas. Permasalahannya adalah **besarnya kebutuhan perpustakaan dan literasi dibandingkan dengan ruang fiskal yang tersedia**.

5.5 Perpustakaan dan Pembangunan Literasi

Perpustakaan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan literasi masyarakat.

Perpustakaan pada 2026 menyebut peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan peningkatan budaya kegemaran membaca sebagai dua prioritas yang menjadi acuan arah pembangunan perpustakaan. Perpustakaan juga dikaitkan dengan pembangunan manusia, kebudayaan, dan penguatan karakter bangsa.

Dengan demikian, investasi pada perpustakaan seharusnya dipandang sebagai investasi terhadap kemampuan masyarakat.

Masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber informasi berkualitas akan memiliki kesempatan lebih besar untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat mendukung kualitas sumber daya manusia.

5.6 Perubahan Paradigma: Dari Tempat Membaca Menjadi Pusat Pemberdayaan

Salah satu cara untuk meningkatkan posisi perpustakaan dalam kebijakan anggaran adalah mengubah paradigma mengenai fungsi perpustakaan.

Perpustakaan tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai tempat membaca. Perpustakaan dapat dikembangkan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Konsep **Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)** merupakan salah satu contoh pendekatan tersebut. Program ini menempatkan perpustakaan sebagai ruang yang dapat membantu masyarakat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan mereka.

Dengan paradigma tersebut, perpustakaan dapat menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan bukan hanya digunakan untuk membeli buku, tetapi juga untuk menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

5.7 Pentingnya Efektivitas dan Akuntabilitas Anggaran

Permintaan peningkatan anggaran harus disertai dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel.

Perpustakaan perlu memastikan bahwa setiap anggaran yang diberikan menghasilkan manfaat yang jelas. Pengukuran keberhasilan tidak cukup hanya menggunakan indikator jumlah kegiatan atau jumlah anggaran yang terserap.

Indikator dapat diarahkan pada:

- peningkatan jumlah pengguna;
- peningkatan kualitas layanan;
- peningkatan akses informasi;
- peningkatan pemanfaatan koleksi;
- peningkatan kemampuan literasi masyarakat;
- peningkatan kompetensi pustakawan;
- peningkatan akses masyarakat terhadap sumber informasi digital;
- peningkatan kepuasan pengguna; dan
- dampak program terhadap kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Perpusnas pada 2026 juga menekankan adanya perubahan paradigma dari sekadar penyerapan anggaran menuju **spending quality**, yaitu belanja yang memperhatikan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

5.8 Strategi Meningkatkan Prioritas Anggaran Perpustakaan

Untuk meningkatkan posisi perpustakaan dalam kebijakan anggaran, beberapa strategi dapat dilakukan.

Pertama, memperkuat data kebutuhan masyarakat

Perpustakaan harus memiliki data yang akurat mengenai kebutuhan penggunanya. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam menyusun perencanaan program dan pengajuan anggaran.

Kedua, menunjukkan dampak program

Setiap program perpustakaan harus memiliki tujuan dan indikator keberhasilan yang jelas.

Misalnya, program pelatihan literasi digital tidak hanya dilaporkan berdasarkan jumlah peserta, tetapi juga berdasarkan peningkatan kemampuan peserta setelah mengikuti program.

Ketiga, meningkatkan kolaborasi

Perpustakaan dapat bekerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, komunitas, lembaga sosial, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.

Kolaborasi dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pembiayaan sekaligus memperluas dampak program.

Keempat, memperkuat transformasi digital

Digitalisasi dapat membantu perpustakaan memperluas jangkauan layanan tanpa selalu bergantung pada pembangunan fisik.

Namun, transformasi digital tetap membutuhkan perencanaan anggaran yang baik agar teknologi yang digunakan benar-benar memberikan manfaat.

Kelima, meningkatkan kapasitas pustakawan

Pustakawan perlu memiliki kemampuan untuk menyusun program, mengelola data, mengukur dampak, membuat laporan, serta melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan.

Keenam, memperkuat advokasi kebijakan

Perpustakaan perlu menyampaikan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa pengembangan perpustakaan memiliki hubungan dengan pendidikan, literasi, kebudayaan, dan pembangunan sumber daya manusia.

Advokasi yang dilakukan harus menggunakan data dan bukti, bukan hanya tuntutan penambahan anggaran.

5.9 Peran Pemerintah dalam Menjamin Keberlanjutan Perpustakaan

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan perpustakaan memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan.

Dukungan tersebut dapat berupa penyediaan anggaran, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan koleksi, penyediaan teknologi informasi, serta pembangunan program literasi.

Pada tingkat pusat, pemerintah dapat memberikan kebijakan dan dukungan yang mendorong pemerataan layanan perpustakaan. Pada tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki peran dalam memastikan perpustakaan daerah dan perpustakaan masyarakat mendapatkan dukungan yang berkelanjutan.

Pemerataan menjadi penting karena kebutuhan masyarakat terhadap informasi tidak hanya berada di wilayah perkotaan. Masyarakat di daerah terpencil, wilayah 3T, desa, serta kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses juga membutuhkan layanan perpustakaan.

Komisi X DPR RI pada 2026 mendorong agar penguatan layanan perpustakaan mencakup wilayah 3T, kelompok marginal, transformasi digital, serta kemitraan dengan perpustakaan daerah dan sekolah.

6. Tantangan ke Depan

Pengembangan perpustakaan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi.

Masyarakat kini dapat memperoleh informasi melalui internet dalam waktu singkat. Kondisi tersebut membuat perpustakaan harus memberikan nilai tambah yang tidak dapat diperoleh hanya dengan melakukan pencarian informasi secara umum.

Perpustakaan harus mampu menjadi lembaga yang membantu masyarakat menemukan informasi yang berkualitas, terpercaya, relevan, dan sesuai kebutuhan.

Selain itu, munculnya kecerdasan buatan, perkembangan sumber informasi digital, perubahan kebutuhan pendidikan, serta meningkatnya tuntutan terhadap keterampilan digital membuat perpustakaan perlu melakukan transformasi.

Transformasi tersebut tidak dapat dilakukan tanpa dukungan anggaran. Oleh sebab itu, kebijakan anggaran perpustakaan perlu disesuaikan dengan perubahan lingkungan informasi.

7. Kesimpulan

Perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan, literasi, penelitian, kebudayaan, dan pembangunan sumber daya manusia. Namun, dalam praktiknya, perpustakaan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan anggaran yang memadai karena harus bersaing dengan berbagai sektor pembangunan lainnya.

Keterbatasan anggaran dapat berdampak pada pengembangan koleksi, fasilitas, transformasi digital, peningkatan kompetensi pustakawan, serta pelaksanaan program literasi. Kondisi anggaran Perpustakaan pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal dapat memengaruhi ruang gerak pelaksanaan berbagai program, meskipun pemerintah tetap mempertahankan sejumlah program prioritas.

Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata apakah perpustakaan mendapatkan anggaran atau tidak, melainkan **apakah besaran dan pola pengalokasian anggaran sudah sebanding dengan kebutuhan serta dampak strategis perpustakaan bagi masyarakat.**

Perpustakaan perlu mengubah cara dalam memperjuangkan anggaran. Pengajuan anggaran harus didukung data, indikator kinerja, bukti manfaat, serta perencanaan program yang jelas. Perpustakaan juga perlu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak dan memperkuat transformasi digital.

Pada akhirnya, perpustakaan seharusnya dipandang bukan sebagai sektor pelengkap pembangunan, melainkan sebagai bagian dari infrastruktur pengetahuan yang mendukung peningkatan kualitas manusia. Penguatan anggaran perpustakaan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun masyarakat yang memiliki kemampuan membaca, mencari, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif.

Daftar Pustaka

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2025). *Perpusnas Lakukan Efisiensi Anggaran Tanpa Ganggu Layanan Publik*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2025). *Perpusnas Berkomitmen Jalankan Program Prioritas Nasional di Tengah Penyesuaian Anggaran 2026*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2025). *Perpusnas Kembali Ajukan Usulan Tambahan Anggaran Pagu Anggaran*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2025). *DAK Nonfisik 2026 Dorong Pemerataan Pengembangan Perpustakaan Daerah*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026). *Dua Prioritas Nasional Jadi Acuan Arah Pembangunan Perpustakaan*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026). *Komisi X DPR RI Dukung Usulan Tambahan Anggaran Belanja 2026 Perpusnas*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026). *Kinerja Anggaran dan Capaian Program, Faktor Penting Alokasi DAK Nonfisik Perpustakaan*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026). *Siaran Pers: Komisi X DPR RI Setujui Pagu Indikatif dan Dukung Penambahan Anggaran Perpusnas Tahun 2027*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026). *Siaran Pers: Komisi X DPR RI Setujui Usulan Penambahan Anggaran Perpusnas 2027*.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2026). *Siaran Pers: Komisi X DPR RI Apresiasi Kinerja Keuangan Perpusnas 2025, Kawal Penguatan Dukungan Anggaran Literasi Nasional*.